

FACEBOOK SEBAGAI KATUP PENYELAMAT

Oleh: Baiq Lily Handayani, S.Sos

Staff Pengajar Sosiologi Universitas Jember

Terdapat sebuah budaya baru pada masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal media menyalurkan aspirasi. Jika dulu, masyarakat menyalurkan aspirasi lewat parpol, media massa, atau dengan cara unjuk rasa turun ke jalanan. Namun saat ini tidak hanya itu yang dipakai sebagai media untuk menyalurkan aspirasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media jejaring sosial facebook.

Menurut data statistik yang dilansir CheckFacebook.com, jumlah pengguna Facebook di Indonesia telah masuk 10 besar jumlah pengguna Facebook terbesar di dunia. Indonesia bertengger di peringkat tujuh, mengalahkan Australia, Spanyol, dan Kolombia di peringkat 10.

Bahkan ketika terjadi kasus-kasus besar dalam negeri ini, seperti kasus Bibit dan Chandra, jutaan facebooker memberikan dukungan mereka terhadap kedua orang pejabat KPK tersebut. Apa yang dilakukan oleh facebooker cukup memberikan pengaruh terhadap pola pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Demikian juga ketika terdapat kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Seorang pasien RS Omni Internasional yang diponis bersalah karena telah mengirimkan email kepada teman-temannya tentang keluhannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional. Jutaan facebooker memberikan dukungan kepada Prita, baik itu dukungan-dukkungan moril, maupun menggalang opini untuk membela Prita. Bahkan ketika Prita dikenai tuntutan perdata dengan membayar sebanyak Rp. 204 juta. Masyarakat menggalang dukungan lewat facebook dengan membuat akun -koin untuk Prita-, hasil dari pengumpulan koin tersebut bahkan mencapai Rp. 500 juta lebih.

Lalu mengapa masyarakat menggunakan facebook sebagai media penggalangan opini dan penyampai aspirasi alternatif? Berikut beberapa alasan mengapa facebook dianggap sebagai media yang cukup efektif saat ini:

- ✚ Media facebook telah dipakai oleh berbagai kalangan di Indonesia, dan sebagian besar adalah kalangan menengah ke atas. Sehingga, opini-opini tersebut lebih mudah dipantau oleh penentu kebijakan di Indonesia.